Ma'ruf Amin: Pemberi Kerja Harus Daftarkan Pekerja dan Keluarganya ke JKN

Wakil Presiden menegaskan semua pekerja dan anggota keluarganya harus terdaftar di layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk itu, ia meminta Pemda ikut mendorong pemberi di wilayahnya agar mendaftarkan para pekerja ke JKN. mengungkapkan upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dilindungi layanan kesehatan. Saya perintahkan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga tanpa kecuali dalam program JKN, kata Maruf Amin saat menghadiri penghargaan Universal Health Coverage di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3). Ma'ruf Amin juga menginstruksikan Pemda untuk mendaftarkan penduduk rentan seperti masyarakat telantar, penduduk lanjut usia, dan para penyandang disabilitas ke layanan BPJS Kesehatan. Maruf juga melarang Pemda untuk mengelola sendiri jaminan kesehatan. Sebab, program dari layanan jaminan kesehatan itu telah ditanggung penuh oleh pemerintah. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan, ujar Maruf. Selain itu, Ma'ruf berharap pemerintah daerah dapat mendorong upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan. Sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu. BPJS Kesehatan mencatat jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia per 1 Maret 2023.